

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kebijakan pemerintah terkait sertifikasi guru non ASN dengan studi kasus di Taman Kanak-Kanak Islam Al-Ihsan. Permasalahan utama yang dikaji adalah ketidakefektifan implementasi kebijakan sertifikasi dalam menjamin kepastian pencairan tunjangan profesi bagi guru non ASN, khususnya di lembaga pendidikan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kebijakan hukum pemerintah dalam program sertifikasi guru non ASN, mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada guru non ASN di TK Islam Al-Ihsan, serta menelaah pandangan Islam terhadap pemenuhan hak dan kesejahteraan guru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data primer yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak guru non ASN atas sertifikasi dan tunjangan profesi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala administratif dan koordinasi antarinstansi yang menyebabkan keterlambatan dan ketidakpastian tunjangan. Dari perspektif Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *Maslahah Mursalah*, keadilan, dan amanah yang mewajibkan pemenuhan hak tenaga pendidik secara tepat waktu dan adil, sehingga diperlukan penguatan perlindungan hukum dan perbaikan implementasi kebijakan guna menjamin kesejahteraan guru non ASN secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum guru non ASN, sertifikasi guru, *Maslahah Mursalah*.